

AB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah sebagaimana yang dijelaskan di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat 2 dimana pemerintah masing-masing daerah mengurus dan mengatur kepentingan pemerintahan mereka sendiri sesuai asas otonomi dan tugas perbantuan. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kemampuan bersaing suatu daerah sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera (Nadir,2013)

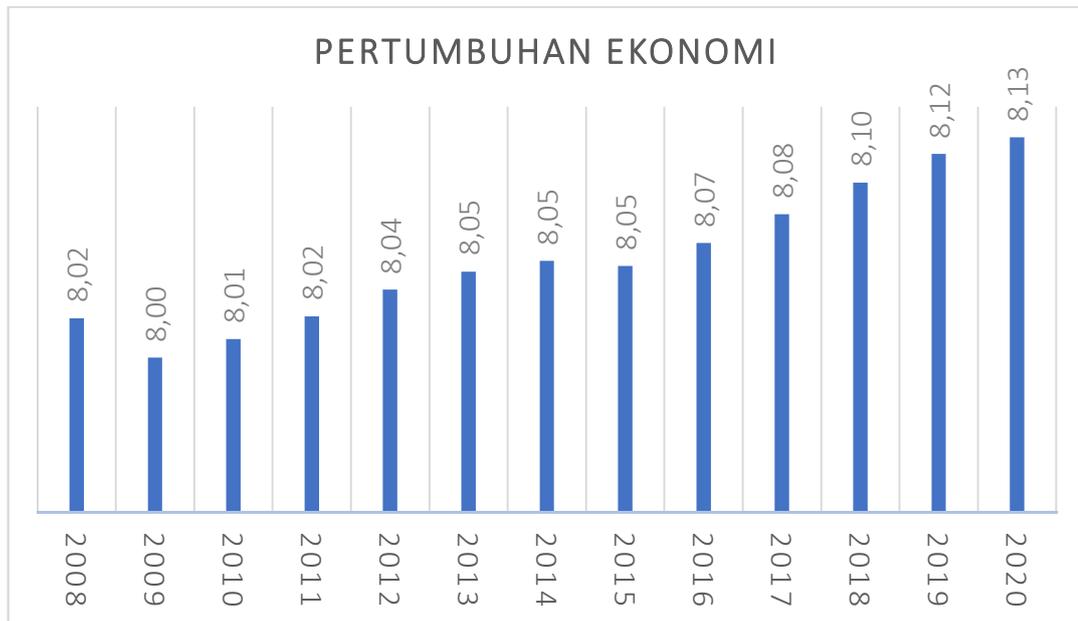
Agar dapat berkembang, pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah harus melihat aspek-aspek yang terdapat pada otonomi daerah .Pertama, pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah. Kedua, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan birokrasi yang sehat dan memiliki wawasan dan jiwa wirausaha. Ketiga, prinsip kepatutan dalam pemerintahan yang tidak terlepas dari kewajiban etika dan moral serta budaya baik antara pemerintah dengan rakyat, antara lembaga/pejabat pemerintahan dengan pihak ketiga. Keempat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga Pemerintah Daerah mendapat petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat (Faisal & Nasution,2016).

Kuncoro, (2003) menyatakan bahwa tolak ukur keberhasilan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor salah satu

strategi yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan penerapan otonomi daerah salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan memaksimalkan penerapan otonomi daerah.

Sejalan dengan tujuan analisis rasio keuangan maka ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan adalah keberhasilan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi disuatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Kinerja perekonomian setiap daerah dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi daerah (laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan). Struktur perekonomian suatu daerah dapat diketahui dengan melihat komposisi (Siregar & Panggabean,2021). Berikut Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Tahun 2008-2021.

Pertumbuhan Ekonomi ini dapat di lihat pada grafik 1.1 di bawah ini :



Sumber : BPS Aceh, 2021

Gambar 1. 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh 2008-2020

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, Pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi Aceh selama 13 tahun terakhir mengalami pola pertumbuhan Ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2009 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh mengalami penurunan sebesar 8,00 persen hal ini disebabkan karena laju inflasi belum sepenuhnya stabil. Sejak tahun 2008 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 8,13 persen. Dimana di tahun 2020 hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang mengalami peningkatan dan stabil dengan memaksimalkan sumber daya manusia, tingginya daya beli masyarakat dan meningkatnya jumlah penduduk sehingga semakin meningkat pula kegiatan produksi barang dan jasa dalam ekonomi masyarakat. Disisi lain Pemerintah juga

sudah mulai mengoptimalkan sektor non migas serta produksi migas dan pertambangan mulai membaik kembali di Provinsi Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh telah berupaya untuk menunjang kelancaran operasional kegiatan perangkat daerah, melalui APBD dengan mengalokasikan anggaran setiap tahun sesuai dengan prioritas dan kemampuan yang ada. Dalam rangka upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab khususnya dibidang keuangan, telah ditempuh kebijaksanaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pemerintah telah mengatur tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan APBD di Provinsi Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran berimbang dan dinamis, kemandirian, efektivitas dan efisiensi, prioritas serta disiplin anggaran. Berikut Perkembangan Pendapatan Daerah Dan Pengeluaran Belanja Daerah Provinsi Aceh Tahun 2008-2022 tabel 1.1

Tabel 1.1
Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Belanja Daerah
Provinsi Aceh Tahun 2008-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (milyar)	Pengeluaran Belanja (milyar)
2008	720.0	8.518.7
2009	740.0	9.791.3
2010	796.9	7.933.7
2011	805.1	6.933.8
2012	901.1	7.800.8
2013	1.309.6	11.779.8
2014	1.779.6	13.368.0
2015	1.560.0	12.755.6
2016	2.060.1	12.874.6
2017	2.276.3	13.832.8
2018	2.359.3	12.306.3
2019	2.698.9	15.787.8
2020	2.184.6	13.242.2

Sumber : BPS Aceh, 2021

Tabel 1.1 menunjukkan data Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Belanja Daerah Provinsi Aceh tahun 2008-2020. Mengalami fluktuasi Pendapatan daerah Provinsi Aceh mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2020. Pada tahun 2008 Pendapatan Asli Daerah Rp. 720.0 miliar rupiah dan tahun 2020 pendapatan daerah meningkat menjadi sebesar Rp. 2.184.6 miliar rupiah. Untuk pengeluaran belanja daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, tahun 2008 angka pengeluaran belanja daerah sebesar Rp.8.518.7 miliar rupiah dan dalam tahun 2020 angka pengeluaran belanja daerah meningkat menjadi Rp.13.242.2 miliar rupiah.

Keterkaitan antara Kinerja Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi yaitu ketika kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya tindakan dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan

daerah tersebut. Disamping itu, aparatur daerah dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja pemerintah merupakan indikator mengukur kinerja pemerintah dalam menilai kinerja pemerintah daerah dapat pula diukur dengan rasio efisiensi, rasio efektifitas dan rasio kemandirian. Pengukuran rasio terhadap pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas cukup menarik untuk diteliti, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang mengambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Provinsi Aceh Tahun 2008-2020 ”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat efisiensi Kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh selama tahun 2008 – 2020 ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas Kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh selama tahun 2008 – 2020 ?

3. Bagaimana tingkat Kemandirian Kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh selama tahun 2008 – 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Mengetahui besarnya pengaruh tingkat efisiensi Kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh selama tahun 2008 – 2020.
2. Mengetahui besarnya pengaruh tingkat efektivitas Kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh selama tahun 2008 – 2020.
3. Mengetahui besarnya pengaruh tingkat Kemandirian Kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh selama tahun 2008 – 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi acuan yang mendukung bagi penelitian lainnya yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait Kinerja Keuangan Daerah Terhadap.

2. Serta menjadi media untuk pembaca maupun penulis dalam memperluas wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Aceh sebagai gambaran tentang Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan ekonomi di era desentralisasi fiskal Provinsi Aceh 2008-2020.
2. sebagai acuan dalam membuat kebijakan yang lebih berkaitan masalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Aceh.
3. Dapat menambah bahan bacaan dan referensi perpustakaan Universitas Malikussaleh dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Khususnya yang berkaitan dengan Rasio Efisiensi, Rasio Efektifitas, dan Rasio Kemandirian.

